

Pengembangan Hunian Pendukung Potensi Wisata Kawasan Pesisir di Tanjung Bayang, Kota Makassar

Yuniza Pridanti^{1)*}, Shirly Wunas²⁾, Mimi Arifin³⁾

¹⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: ypridanti@gmail.com

²⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: shirly_wunas@yahoo.com

³⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: mimiarifin@yahoo.com

ABSTRACT

The strategic position of the beach tends to be neglected by the development of informal dwellings in the Tanjung Bayang Coastal Area that has not yet paid attention to the rules of building layout. The purpose of this study was to identify residential sites, tourism facilities, accessibility, tourism support infrastructure, economic, social and cultural aspects of the area management system, and to arrange directions for the development of residential tourism potential supporters in Tanjung Bayang. Data collection methods used are, field observations, questionnaires, interviews, and literature studies. The data obtained is then processed using descriptive analysis techniques with qualitative, quantitative, comparative, and spatial analysis approaches. The results of this study indicate that, dwelling sites have a relatively low density with a distance between houses $\leq 2m$. Non-stage footprint is located on the border area of the beach, but safe from high tide. The tourist support facilities (bale-bale) tend to be dense (5 units / 1 roof) and the rinse building has not served the entire area. access to the area is a function of local roads that lie between the walls of real estate, not yet equipped with markers and pedestrian paths. There is no TPS or waste disposal depot. The electricity network for buildings is adequate, but there are no lighting for bale-bales and rental residences. The dominant community works and utilizes beach facilities as a livelihood. The proposed concept of directives is the development of residential houses into rental housing and the development of facilities, infrastructure, accessibility, and community-based area management systems.

Keywords: Development, Residential, Potential, Tourism, Tanjung Bayang Beach

ABSTRAK

Posisi strategis pantai cenderung diabaikan dengan perkembangan hunian informal di Kawasan Pesisir Tanjung Bayang yang belum memperhatikan aturan tata bangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi tapak hunian, sarana wisata, aksesibilitas, prasarana penunjang wisata, aspek ekonomi, sosial dan budaya terhadap sistem pengelolaan kawasan, serta menyusun arahan pengembangan hunian pendukung potensi wisata di Tanjung Bayang. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi lapangan, kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, komparatif, dan analisis spasial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tapak hunian mempunyai kepadatan yang relatif rendah dengan jarak antar rumah $\leq 2m$. Tapak hunian non panggung terletak di area sempadan pantai, namun aman dari waktu pasang air laut. Tapak sarana penunjang wisata (bale-bale) cenderung padat (5 unit/1 atap) dan bangunan bilas belum melayani seluruh kawasan. akses menuju kawasan merupakan fungsi jalan lokal yang berada diantara dinding *real estate*, belum dilengkapi penanda dan jalur pejalan kaki. Belum terdapat TPS ataupun depo pembuangan sampah. Jaringan listrik untuk bangunan sudah memadai, namun belum terdapat lampu penerangan untuk bale-bale dan hunian sewa. Dominan masyarakat bekerja dan memanfaatkan fasilitas pantai sebagai mata pencaharian. Konsep arahan yang diusulkan berupa pengembangan rumah tinggal menjadi hunian sewa dan pengembangan sarana, prasarana, aksesibilitas, serta sistem pengelolaan kawasan berbasis masyarakat.

Kata Kunci: Pengembangan, Hunian, Potensi, Wisata, Pantai Tanjung Bayang

PENDAHULUAN

Kota Makassar merupakan salah satu kota berciri khas pantai dengan kehidupan pesisir. Pantai Tanjung Bayang adalah salah satu kawasan pesisir

yang menjadi potensi wisata. Berdasarkan RTRW Kota Makassar bahwa, Kawasan Pesisir Tanjung Bayang diarahkan sebagai kawasan pariwisata terpadu dan harus didukung dengan perencanaan,

*Corresponding author. Tel.: +62-812-4338-9193

Jalan Poros Malino km. 6 Bontomarannu, Gowa
Sulawesi Selatan, Indonesia, 92711

pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian (UU No. 27 Tahun 2007).

Namun demikian, berbagai masalah terjadi, seperti orientasi hunian dan garis sempadan bangunan yang tidak jelas, jarak antar hunian yang sangat rapat atau kurang dari dua meter, kondisi infrastruktur penunjang seperti listrik, persampahan, dan limbah yang belum memadai. Selain itu, Kondisi gazebo informal yang belum layak huni, saling berdempetan satu sama lain dan mendorong perilaku asusila membuat Kawasan Pesisir Tanjung Bayang semakin mengalami penurunan kualitas pantai. Penggunaan wilayah pesisir dan pulau secara berlebihan mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengembangan permukiman pesisir Tanjung Bayang dengan memaksimalkan potensi wisata yang ada.

KAJIAN PUSTAKA

Amri (2014:33) mengemukakan bahwa pada umumnya permukiman di kawasan pesisir adalah mengikuti dan berorientasi ke perairan sesuai orientasi kegiatan berbasis perairan. Selanjutnya terdapat dua bentuk permukiman pesisir, yakni bentuk tradisional atau panggung dan bentuk rumah modern atau non panggung. Wunus (2014) mengemukakan hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan pesisir adalah 1) jarak bangunan dengan pantai; 2) jarak antar bangunan; dan 3) jarak bangunan dengan jalan. Middleton (2001) dalam Rusnanda (2015:15) mengemukakan, bahwa terdapat tiga komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenities atau fasilitas. Teori pengembangan wisata yang menjadi acuan

dalam penelitian ini adalah *pro poor* atau wisata berbasis masyarakat. *Pro Poor Tourism* oleh Laksani (2010) secara bebas diterjemahkan sebagai suatu pariwisata yang menghasilkan peningkatan pendapatan bersih bagi masyarakat miskin atau ekonomi lemah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode *purposive sampling* dengan karakteristik hunian sewa dan rumah tinggal yang berbentuk panggung. Data primer berupa karakteristik dan pola hunian, kondisi geografis hunian, kondisi ekonomi, sosial dan budaya, ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, serta ketersediaan LPM yang diperoleh dengan teknik observasi, dokumentasi, kuesioner, dan wawancara. Data sekunder berupa peta dasar lokasi penelitian, data kondisi kemiringan lereng yang diperoleh melalui studi literatur kebijakan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif berupa penyajian data dalam bentuk tabulasi pada data kemiringan lereng, geografis, karakteristik hunian, prasarana penunjang wisata, dan kondisi ekonomi masyarakat, analisis komparatif yang digunakan untuk membandingkan kondisi eksisting dengan NSPM berlaku dan analisis spasial pada data tapak hunian, sarana dan prasarana, serta aksesibilitas dengan teknik pemetaan menggunakan peta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Pesisir Tanjung Bayang merupakan lahan dengan klasifikasi kemiringan lereng 0-2 % yang layak untuk pengembangan hunian dan pariwisata.



Gambar 1. Transek kemiringan lereng Kawasan Tanjung Bayang

Permukiman lapis pertama mengikuti dan menghadap geografis pantai secara linear. Namun, beberapa hunian sewa potensi sea view terhalang oleh keberadaan bale - bale yang tertutup dan tidak teratur.

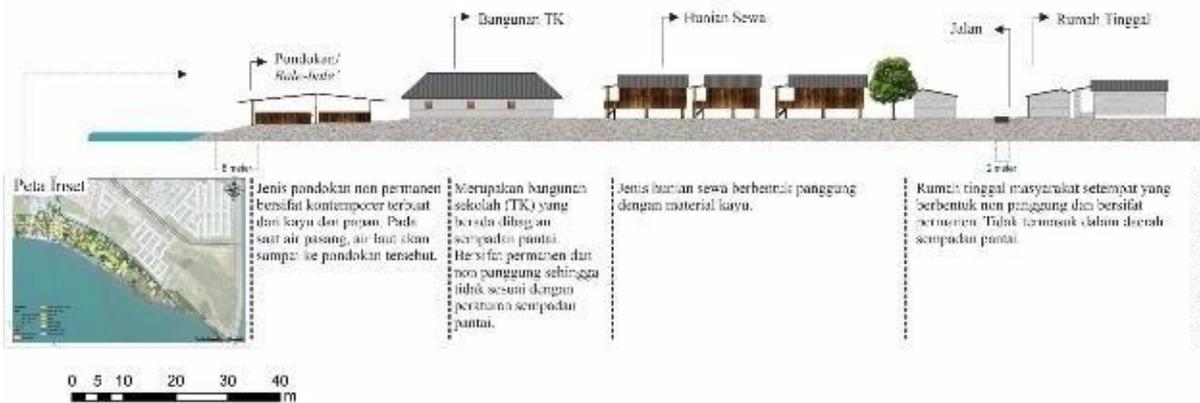


Gambar 2. Potensi sea view dari hunian sewa yang dihalangi bale-bale

Tabel 1. Jarak hunian sewa terhadap pantai

Jarak (m)	Jumlah	
	n	Persentase (%)
0-100	46	92
>100	4	8
Total	50	100

Titik air pasang tertinggi di kawasan ini adalah 7-10 meter dari bibir pantai dan akan naik ke permukaan hanya sampai ke bale-bale. Sehingga, tidak membahayakan keselamatan bangunan dan pengunjung yang sedang berwisata.



Gambar 3. Potongan sempadan Tanjung Bayang

Terdapat dua kecenderungan pola hunian sewa dengan rumah tinggal pemilik hunian sewa yang berada di Kawasan Pesisir Tanjung Bayang. Beberapa pemilik cenderung membangun hunian

sewa dekat dengan rumah tinggal untuk mempermudah proses pemantauan hunian sewa oleh pemiliknya.



Gambar 4. Hunian sewa yang dibangun dekat dengan rumah tinggal



Gambar 5. Hunian sewa yang dibangun cukup jauh dari rumah tinggal

Sejak tahun 2001 rumah tinggal masyarakat telah dibangun di kawasan ini dan berkembang ke arah pantai seiring dengan permintaan pengunjung akan hunian sewa semakin meningkat. Hingga

pada tahun 2015 puncak pembangunan hunian sewa hampir sangat dekat dengan bibir pantai (15 meter dari bibir pantai).

Dominan hunian sewa berbentuk panggung dengan persentase 56%, sedangkan bentuk hunian sewa non panggung memiliki persentase 44%. Selanjutnya, hunian tinggal masyarakat 49% berbentuk panggung. Pemilik hunian dapat memanfaatkan bagian kolong rumah sebagai hunian sewa dan warung campuran.

Tabel 2. Bentuk rumah sewa di Tanjung Bayang

Bentuk Hunian	Jumlah	
	n	Persentase (%)
Non Panggung	22	44
Panggung	28	56
Total	50	100



Gambar 6. Peta bentuk hunian di Kawasan Tanjung Bayang
 Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2017

Tabel 3. Ketersediaan kamar mandi/ toilet dan dapur

Jenis	Toilet		Total	Dapur		Total
	Ya	Tidak		Ya	Tidak	
Hunian Sewa	50	-	50	43	7	50
Rumah Tinggal	21	-	21	21	-	21



Gambar 7. Jarak antar rumah kurang dari 2 m

Rata-rata luas rumah tinggal di kawasan ini adalah 78 m². Satu hunian rata-rata dihuni oleh 4-5 jiwa per rumah, maka satu orang mendapatkan 20 m²-15 m². Hal ini berarti kepadatan huni rumah tinggal di kawasan ini tergolong cukup rendah sehingga dapat dimanfaatkan atau dikembangkan menjadi hunian sewa. Selain itu, permasalahan jarak antar bangunan cenderung terjadi di hunian sewa. Hal ini dikarenakan, hunian sewa yang saling berdempetan tersebut dibangun oleh satu pemilik yang sama. Sehingga, mengindahkan jarak antar hunian tersebut.

Sarana akomodasi di kawasan ini berupa hunian sewa bagi pengunjung yang ingin menetap setengah hari bahkan satu malam atau lebih dan pondok-pondok/ bale - bale bagi pengunjung yang hanya menetap setengah hari. Sebagian besar (60%) hunian sewa dimiliki oleh masyarakat lokal (103 unit) dan 40% merupakan investasi dari masyarakat luar.



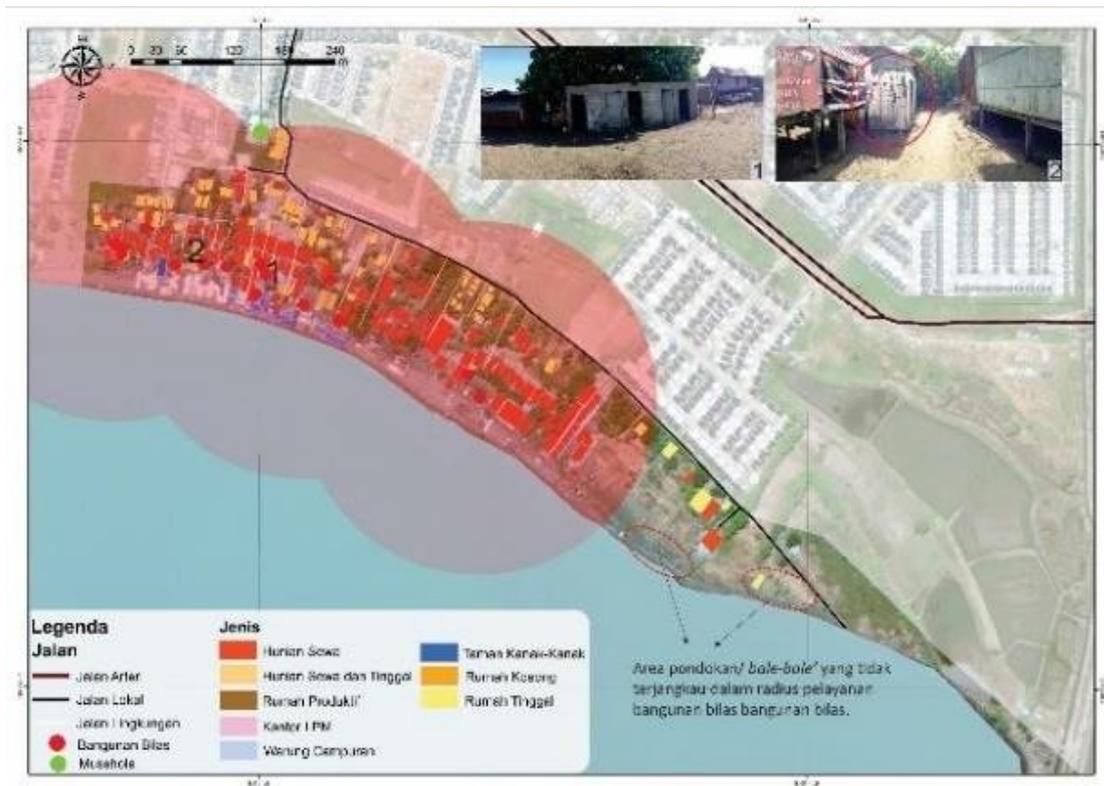
Gambar 8. Hunian sewa di Kawasan Tanjung Bayang

Terdapat 541 unit pondokan di Kawasan Pesisir Tanjung Bayang dengan kondisi kurang memadai, saling berdempetan satu sama lain. Jumlah pondokan sebanyak 541 unit apabila diasumsikan satu bale-bale dapat dihuni oleh 4 jiwa, maka seluruh pondokan di Kawasan Pesisir Tanjung Bayang dapat menampung kurang lebih 2.164 jiwa pengunjung. Berdasarkan data jumlah pengunjung pengelola kawasan setempat jumlah pengunjung yang datang pada situasi *pick hour* adalah sebanyak 2.200 jiwa.



Gambar 9. Bale - bale yang terbangun belum mengikuti standar penataan bangunan

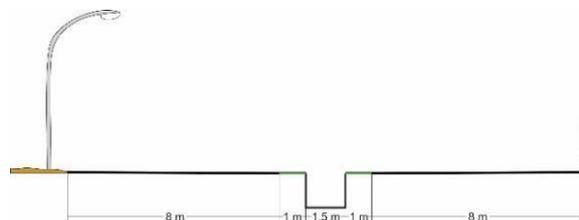
Sarana pelayanan yang tersedia adalah bangunan bilas dan masjid. Berdasarkan hasil analisis spasial dengan membuat radius pelayanan sarana pelayanan bangunan bilas (200 m) yang ditempuh dengan berjalan kaki masih terdapat beberapa pondokan/bale-bale yang belum terlayani.



Gambar 10. Peta radius sarana pelayanan bangunan bilas

Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2017

Selain itu, masyarakat memanfaatkan kolong rumah sebagai tempat untuk berjualan sehingga terbentuk hunian usaha. Warung yang tersedia dengan standar radius pelayanan 300 m telah dapat melayani seluruh kawasan. Sarana kesehatan juga dapat diakses dari kawasan ini dengan kendaraan bermotor. Selanjutnya, jalan yang akan dilalui sebelum masuk ke kawasan ini adalah Jl. Metro Tanjung Bunga dengan fungsi jalan arteri yang menghubungkan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar bermaterial *paving block*, lebar 8 m dan volume kendaraan rendah.



Gambar 11. Potongan jalan arteri (Jl. Metro Tanjung Bunga)

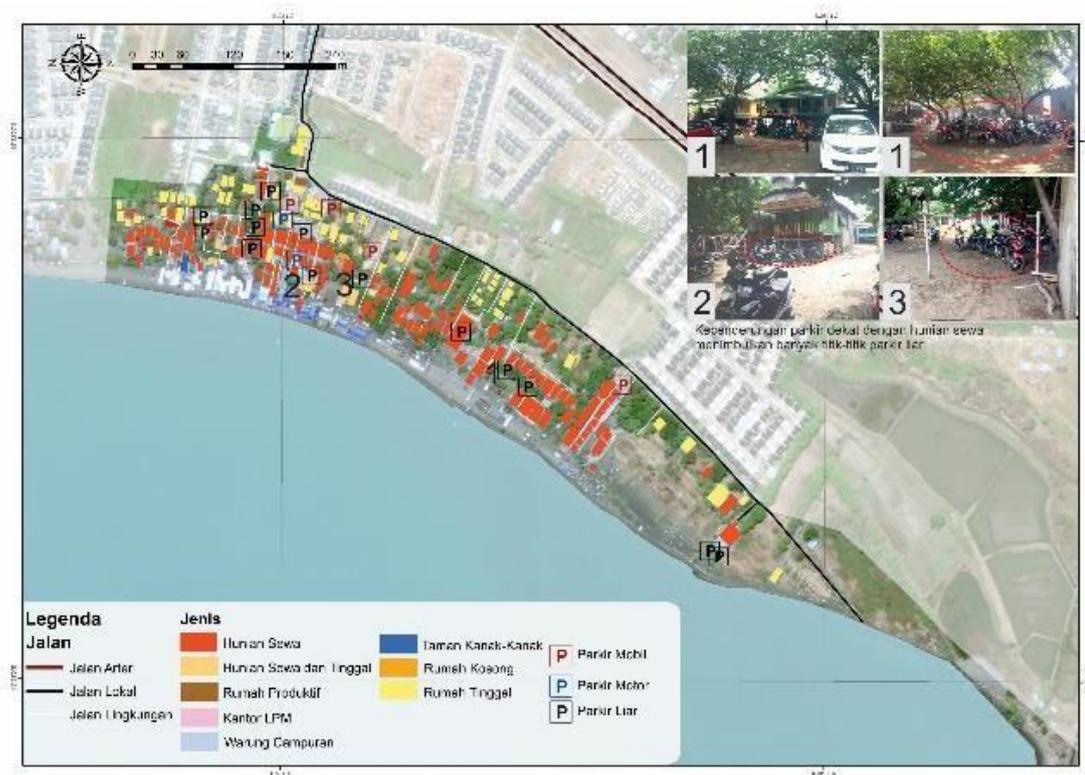
Jalan masuk Tanjung Bayang merupakan jalan lokal bermaterial *paving block*, lebar 5-6 m. Akses menuju kawasan berada di antara dinding pagar *real estate* yang berkembang cukup kuat sehingga jalan masuk ke kawasan ini tidak begitu jelas.



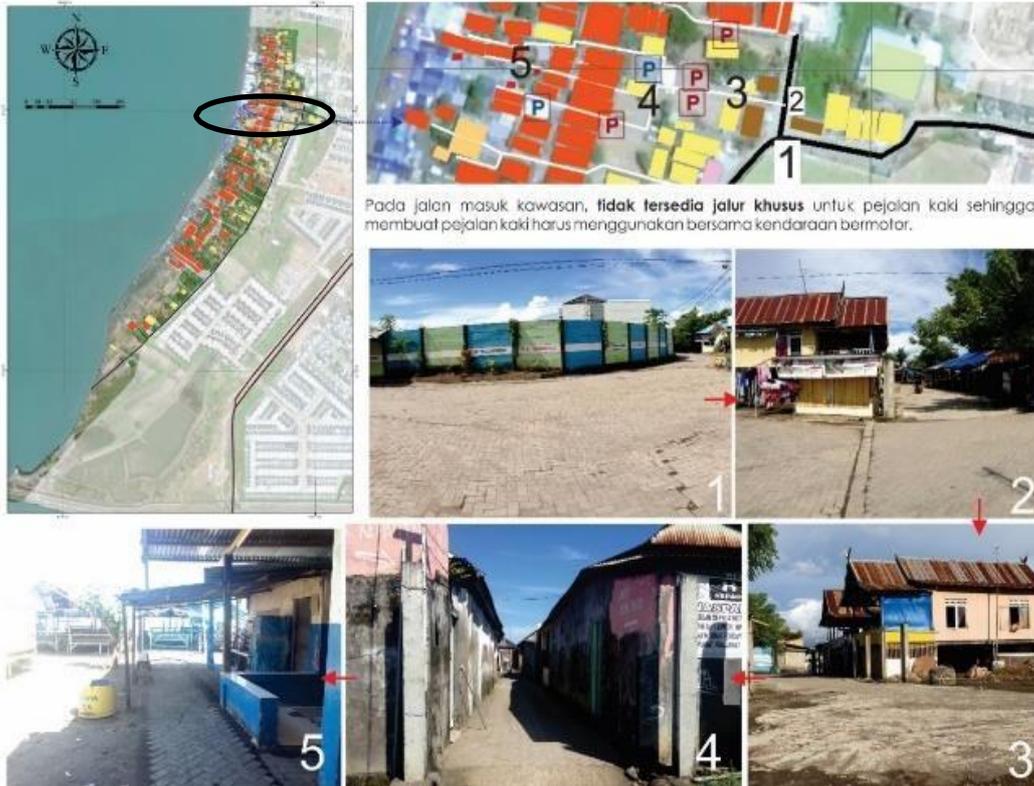
Gambar 12. Peta jaringan jalan lokal
 Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2017

Setelah melewati jalan lokal, selanjutnya terdapat jalan lingkungan dengan material perkerasan dominan paving block dan terdapat pula beberapa

yang belum memiliki perkerasan. Jalan lingkungan memiliki lebar 1,5-3 m digunakan oleh pejalan kaki dan kendaraan bermotor untuk mengakses parkir.



Gambar 13. Peta parkir di Kawasan Tanjung Bayang
 Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2017



Pada jalan masuk kawasan, tidak tersedia jalur khusus untuk pejalan kaki sehingga membuat pejalan kaki harus menggunakan bersama kendaraan bermotor.

Gambar 14. Akses dari parkir menuju pantai
 Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2017

Angkutan umum yang melayani kawasan ini adalah BRT, pete-pete, dan taksi.



Gambar 16. Peta ketersediaan angkutan umum
 Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2017



Gambar 15. Peta jalur koridor BRT menuju Tanjung Bayang
 Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2017

Prasarana penunjang wisata di lokasi penelitian berupa, air bersih, persampahan, listrik, dan limbah. Air dikatakan baik bila memenuhi syarat, jernih/tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa (Permen Kesehatan RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990). Air yang berasal dari sumur bor dikatakan cukup asin karena keberadaannya yang dekat dengan pantai.



Gambar 17. Peta jaringan air bersih
 Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2017

Tabel 4. Persentase sumber air bersih

Jenis	Sumber Air Bersih			
	Hunian Sewa		Rumah Tinggal	
	Jumlah (Unit)	(%)	Jumlah (Unit)	(%)
PDAM	19	38	16	76
Sumur Bor	31	62	5	24
Total	50	100	21	100

Tabel 5. Sistem pembuangan sampah

Sistem Pembuangan Sampah	Jenis Hunian			
	Hunian Sewa	(%)	Rumah Tinggal	(%)
Dibakar	44	88	2	10
Diambil Petugas Sampah	6	12	19	90
Total	50	100	21	100

Selanjutnya, 88% sampah yang berasal dari hunian sewa cenderung dikumpulkan lalu dibakar.



Gambar 17. Peta jaringan air bersih
 Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2017

Selanjutnya, untuk infrastruktur listrik 72% hunian sewa telah memiliki listrik pribadi.

Tabel 6. Ketersediaan jaringan listrik

Jaringan Listrik	Jenis Hunian			
	Hunian Sewa		Rumah Tinggal	
	n	(%)	n	(%)
Milik Sendiri	19	38	16	76
Bersama Tetangga	31	62	5	24
Total	50	100	21	100

Terdapat pula beberapa titik bale - bale dan hunian sewa yang sangat minim penerangan. Hal ini juga disalahgunakan oleh remaja-remaja yang cenderung berkumpul dengan lawan jenis pada malam hari dalam kondisi gelap (detikNews, Juni 2014).

Sebanyak 90% hunian sewa memiliki tangki septik pribadi, dan terdapat 10% yang belum memiliki sistem saluran lokal di kawasan ini hanya melayani pada bagian depan kawasan. Masyarakat akhirnya harus membuat saluran-saluran darurat sebagai pembuangan air kotor sisa rumah tangga.



Gambar 19. Saluran darurat pembuangan limbah rumah tangga



Gambar 20. Saluran lokal yang dipenuhi oleh sampah

Tabel 7. Jenis mata pencaharian masyarakat

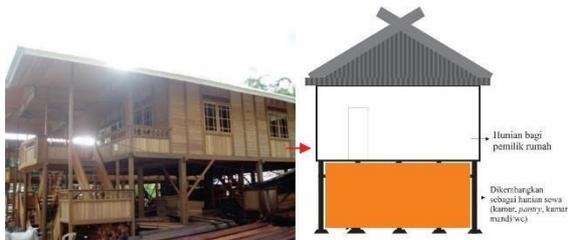
Jenis Mata Pencaharian KK	Jumlah	
	n	Persentase (%)
Wirasaha	20	95
Nelayan	1	5
Total	21	100

Berdasarkan hasil survei, rata-rata masyarakat lokal mempunyai 2 unit hunian sewa dan 4 unit bale-bale, dengan rata-rata pendapatan kurang lebih Rp.4.800.000/bulan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki hunian sewa, paling tidak, masyarakat memiliki 4-5 unit bale-bale dan satu bangunan bilas.

Dominan masyarakat yaitu, sebanyak 60% hanya mengenyam pendidikan hingga ke jenjang Sekolah Dasar (SD). Jenjang pendidikan yang tidak begitu tinggi membuat tidak banyak pekerjaan formal yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat yang dominan (95%) bersuku makassar cenderung terbuka dan ramah dalam menyambut pengunjung yang ada. Namun, pemahaman dan perhatian masyarakat setempat tentang kebersihan masih tergolong rendah dibuktikan dengan sampah di kawasan pantai yang berserakan.

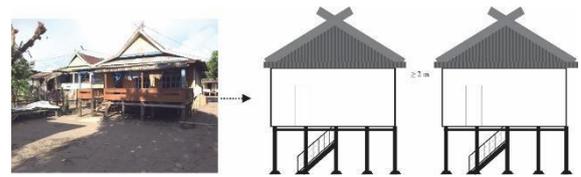
Terdapat lembaga yang mengatur dan mengelola jalannya aktivitas pariwisata di Kawasan Pesisir Tanjung Bayang, yakni LPM Tanjung Merdeka. Masyarakat Kawasan Tanjung Bayang dinilai telah cukup berperan sebagai tuan rumah di kawasan wisata ini. Hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha fasilitas penunjang wisata yang sebagian besar dimiliki dan dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Namun demikian, seluruh masyarakat belum dilibatkan lebih lanjut oleh petinggi-petinggi LPM dalam pengambilan keputusan dikarenakan minimnya sosialisasi atau pertemuan yang dilakukan.

Arahan pengembangan tapak hunian masyarakat lokal sejalan dengan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.



Gambar 21. Ilustrasi pengembangan rumah tinggal menjadi hunian sewa

Hunian sewa yang tidak memiliki jarak satu sama lain akan dilakukan penataan jarak agar memiliki sirkulasi yang baik.



Gambar 22. Ilustrasi penataan jarak antar hunian

Sarana 550 unit bale-bale yang lebih terbuka, berjarak satu dengan lainnya agar lebih mendapatkan sirkulasi udara dan akses yang baik (1 bale-bale dihuni oleh 4 pengunjung, dimana total pengunjung 2.200 jiwa/4 = 550).



Gambar 23. Peta zonasi dan ilustrasi bale – bale
Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2017

Selanjutnya, untuk menghindari pembangunan yang mengarah ke bibir pantai maka diarahkan

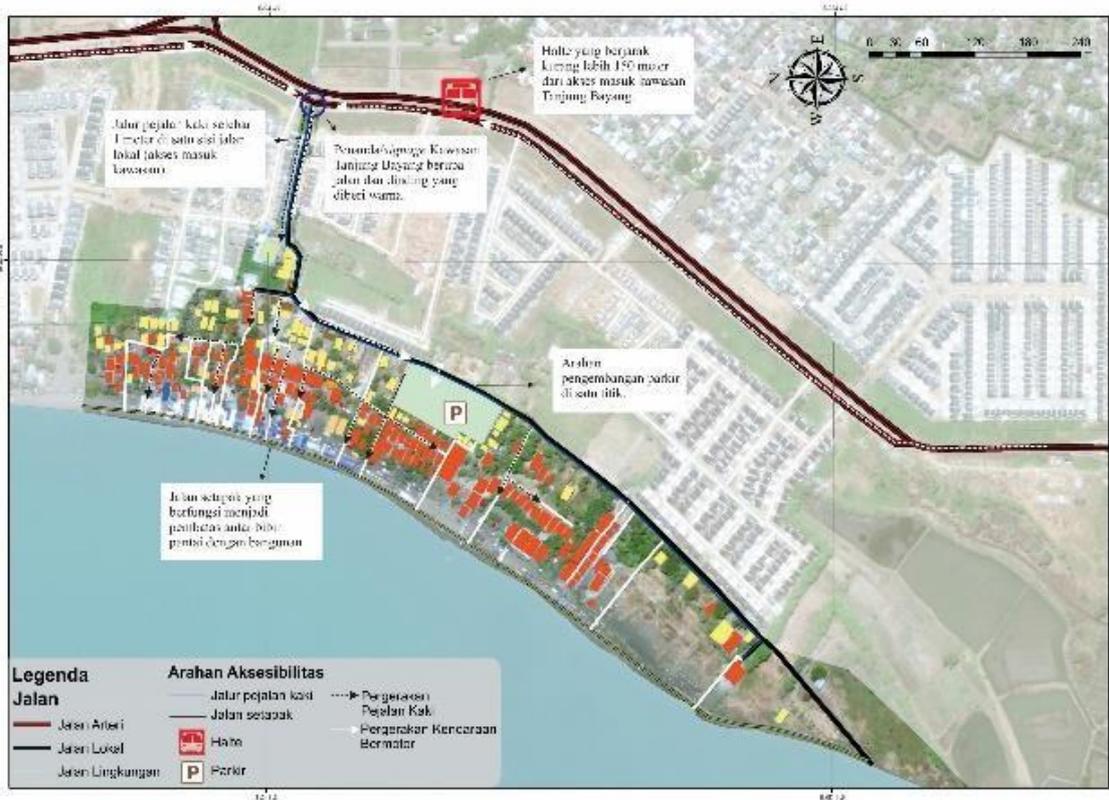
adanya jalan setapak yang berjarak 3 meter dari bibir pantai dengan lebar 2 meter



Gambar 24. Peta arahan sarana penunjang wisata
Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2017

Arahan aksesibilitas meliputi pengadaan halte agar lebih mudah dijangkau oleh pengunjung, pengadaan jalur pejalan kaki yang memisahkan

kendaraan bermotor dengan pejalan kaki, pengadaan parkir terpadu di satu titik, serta pengadaan penanda/*signage* pada akses masuk.



Gambar 25. Peta arahan aksesibilitas

Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2017

Arahan prasarana penunjang wisata untuk air bersih yaitu, pendistribusian air bersih hingga ke seluruh kawasan, penyediaan komponen persampahan dan teknik operasional pembuangan sampah, arahan lampu penerangan di beberapa titik di kawasan bale - bale , pengadaan IPAL komunal dan saluran lokal dengan lebar terbatas hingga ke seluruh permukiman, arahan pengadaan break water untuk meminimalisir terjadinya abrasi.

Arahan sistem pengelolaan Kawasan Tanjung Bayang adalah berbasis masyarakat yakni, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam merealisasikan hal tersebut, tentunya masyarakat membutuhkan suatu sistem kelembagaan yang selanjutnya dapat mengatur pengelolaan yang sistematis. Disinilah peran LPM yang ada semakin ditingkatkan. Selain peran LPM dan masyarakat setempat, pemerintah diharapkan juga turut andil dalam pengembangan Kawasan Tanjung Bayang yang juga merupakan salah satu potensi wisata pantai Kota Makassar.



Gambar 26. Tugas dan fungsi lembaga pengelola kawasan

Sistem promosi Kawasan Tanjung Bayang dapat berupa media elektronik berupa website khusus wisata Pantai Tanjung Bayang yang menggambarkan keindahan wisata pantai itu sendiri, ataupun berupa pamflet, poster, atau selebaran yang berada di titik-titik strategis kawasan wisata, atau bahkan di Bandara Sultan Hasanuddin dan sarana transportasi umum lainnya.

Adanya pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan permukiman dan pantai.

Masyarakat juga dapat diberi pemahaman mengenai cara menjaga kelestarian dan keselamatan wilayah pantai dari bencana yang akan terjadi.

KESIMPULAN

Tapak hunian mempunyai kepadatan yang relatif rendah dengan jarak antar rumah \leq 2m. Tapak hunian non panggung terletak di area sempadan pantai, namun aman dari waktu pasang air laut. Tapak sarana penunjang wisata (bale-bale) cenderung padat (5 unit/1 atap) dan bangunan bilas belum melayani seluruh kawasan.

Akses masuk menuju kawasan adalah fungsi jalan lokal yang berada di antara dinding real estate, belum dilengkapi penanda dan jalur pejalan kaki. Material jalan lingkungan adalah paving block. Angkutan umum yang melayani kawasan ini adalah BRT, pete-pete, dan taksi, Namun, halte BRT yang tersedia \pm 1,5 km dari akses masuk kawasan. Belum terdapat TPS ataupun depo pembuangan sampah. Air limbah rumah tangga langsung dibuang ke tanah tanpa pengolahan sebelumnya. Jaringan listrik untuk bangunan sudah memadai, namun belum terdapat lampu penerangan untuk bale-bale dan hunian sewa.

Sebagian besar (95%) masyarakat Kawasan Tanjung Bayang memanfaatkan fasilitas wisata sebagai mata pencaharian. Masyarakat dibantu oleh LPM dalam pengelolaan. Hanya saja, masyarakat belum dilibatkan lebih jauh dalam pengambilan keputusan.

Konsep arahan yang diusulkan adalah arhan pengembangan hunian, arahan pengembangan sarana, prasarana, aksesibilitas penunjang wisata, dan arahan sistem pengelolaan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Nurmaida dan Idawarni (2014). *Laporan Penulisan Buku Ajar Perumahan dan Permukiman Pesisir*. Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Detiknews. Website: <https://news.detik.com/berita/d-2604668/kurang-penerangan-objek-wisata-di-makassar-kerap-jadi-tempat-mesum> (akses terakhir 2 Desember 2019).
- Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2015 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2010-2030*. Website: https://www.academia.edu/38415757/PERDA_RTRW_KOTA_MAKASSAR_2015-2034 (akses terakhir 23 Agustus 2019).
- Laksani, C.S. (2010). *Analisis Pro - Poor Growth di Indonesia melalui Identifikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik*. Skripsi. Universitas Indonesia. Website: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131336-T%2027617-Analisis%20pro-poor-HA.pdf> (akses terakhir 23 Agustus 2019).
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 tentang *Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air*. Web: [https://baristandsamarinda.kemenerperin.go.id/download/PerMenKes416\(1990\)-Syarat&Pengawasan_Kualitas_Air.pdf](https://baristandsamarinda.kemenerperin.go.id/download/PerMenKes416(1990)-Syarat&Pengawasan_Kualitas_Air.pdf) (akses terakhir 2 Desember 2019).
- Pemerintah Republik Indonesia. UU RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang *Perumahan dan Permukiman*. Website: <https://www.bphn.go.id/data/documents/92uu004.pdf> (akses terakhir 23 Agustus 2019).
- Pemerintah Republik Indonesia. UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Kawasan Pesisir*. Website: <https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/3.pdf> (akses terakhir 23 Agustus 2019).
- Rusnanda, R. *Kajian Potensi Wisata Kota Tapaktuan, Berbasis Masyarakat Lokal*. Skripsi. Fakultas Teknik. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Wunas, S. Arifin, M. Natalia, V.V. (2014). *Principles of Location Development For Housing and Sea weed Processing Industrial Based on Community Approach (Case Study: Bantaeng Regency Watershed)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.